

Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Kerja (POKJA) di Kalurahan Sidoagung Kabupaten Sleman

Elsa Indah Sanjaya^{1*}, Bhakti Gusti Walinegoro²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : elsaindah0606@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 05 Mei, 2026

Page: 508-518

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i5.2055>

Article History:

Received: April 10, 2026

Revised: Mei 08, 2026

Accepted: Mei 19, 2026

Abstract : This study aims to analyze women's empowerment through the Family Welfare Movement (PKK) Working Group (Pokja) in Sidoagung Village and identify obstacles that affect its effective implementation. This topic is important because the implementation of empowerment is still suboptimal, as indicated by limited access, unequal participation, less than fully independent control, and benefits that have not been fully felt. The study used a descriptive qualitative approach with data collection through interviews, observation, and documentation of village officials, PKK administrators, and Pokja members. The analysis was conducted based on empowerment indicators including access, participation, control, and benefits. The results show that access to the program is available through institutional support and facilitation from the village government, but is still limited by budget. Women's participation is quite active, although not evenly distributed across all members. Control of the program rests with the PKK organization through a deliberation mechanism, but is still influenced by funding policies. Meanwhile, the benefits of empowerment are seen in increased knowledge, skills, and economic opportunities. This study emphasizes the need to strengthen program sustainability and equalize access so that women's empowerment can be more effective and have a broad impact.

Keywords : Empowerment, Women, Working Groups (POKJA), PKK, Participation

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Kerja (Pokja) PKK di Kalurahan Sidoagung serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Topik ini penting karena pelaksanaan pemberdayaan masih belum optimal, ditunjukkan oleh keterbatasan akses, partisipasi yang belum merata, kontrol yang belum sepenuhnya mandiri, serta manfaat yang belum dirasakan secara menyeluruh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perangkat kalurahan, pengurus PKK, dan anggota Pokja. Analisis dilakukan berdasarkan indikator pemberdayaan yang meliputi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap program telah tersedia melalui dukungan kelembagaan dan fasilitasi pemerintah kalurahan, namun masih terbatas oleh anggaran. Partisipasi perempuan tergolong aktif, meskipun belum merata di seluruh anggota. Kontrol program berada pada

organisasi PKK melalui mekanisme musyawarah, tetapi masih dipengaruhi oleh kebijakan pendanaan. Sementara itu, manfaat pemberdayaan terlihat dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan peluang ekonomi. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan keberlanjutan program dan pemerataan akses agar pemberdayaan perempuan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Perempuan, Kelompok Kerja (POKJA), PKK, Partisipasi

PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan penting dalam pembangunan desa karena meningkatkan keterampilan, partisipasi, dan peran aktif perempuan dalam pembangunan guna mendukung kesejahteraan keluarga serta ketahanan sosial masyarakat (Miftakhuljannah et al., 2022). Pemberdayaan perempuan juga diarahkan pada peningkatan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian perempuan melalui berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat (Muktiono, 2024). Hal ini diperkuat melalui penelitian yang menunjukkan bahwa program PKK sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan peran perempuan dalam pendidikan dan keterampilan melalui kegiatan yang terstruktur di tingkat desa (Utami et al., 2025). Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan wawasan, perilaku, serta keterampilan individu agar mereka mampu bekerja dan berusaha secara mandiri dalam upaya memperbaiki taraf kehidupannya (Setiawan & Kusniawati, 2024).

Secara konseptual, pemberdayaan perempuan merupakan proses multidimensional yang meningkatkan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dan komunitas (Dupuis et al., 2022). Selain itu, peningkatan kapasitas ekonomi terbukti berpengaruh terhadap otonomi perempuan dan kemampuan mengambil keputusan dalam rumah tangga maupun masyarakat (Ver et al., 2024). Studi lain juga menegaskan bahwa penguatan keterampilan kewirausahaan perempuan di wilayah pedesaan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas (Jaiswal et al., 2024). Untuk memahami konsep pemberdayaan perempuan secara lebih mendalam, diperlukan landasan teoritis yang relevan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan. Menurut Suharto (2021) dalam (Hutagalung, 2022) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan rangkaian aktivitas untuk memperkuat kekuatan atau kemampuan kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk para individu yang menghadapi isu kemiskinan. Kemudian menurut Adam dalam (Suryati & Nazarmanto, 2022) Pemberdayaan merupakan proses yang membantu individu atau masyarakat meningkatkan kemampuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan, menentukan masa depan, serta mengembangkan kualitas hidup secara optima.

Nugroho (2013) dalam (Hermawan et al., 2021) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk mendorong kemandirian masyarakat dengan mengembangkan serta mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Penelitian ini menggunakan indikator pemberdayaan menurut Riant Nugroho (2008) dalam (Hidayatin, 2021), yang terdiri dari Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif di dalam lingkungan. Partisipasi yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut. Kontrol yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya. Manfaat yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Pada konteks kelembagaan desa, program pemberdayaan perempuan banyak dilaksanakan melalui organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang menjadi wadah formal perempuan dalam melaksanakan program pendidikan, sosialisasi kesehatan, ekonomi rumah tangga dan kegiatan sosial. Kelembagaan PKK berfungsi sebagai sarana implementasi prinsip

pemberdayaan di tingkat lokal karena memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat desa (Kusumaningsih & Rianawati, 2024). Melalui berbagai kegiatan yang terstruktur, PKK tidak hanya berperan sebagai organisasi sosial, tetapi juga sebagai media penguatan kapasitas perempuan dalam meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan potensi perempuan di masyarakat (Mauludia, 2025). Hal ini diperkuat melalui penelitian yang menunjukkan bahwa program PKK sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan peran perempuan dalam pendidikan dan keterampilan melalui kegiatan yang terstruktur di tingkat desa (Utami et al., 2025).

Kalurahan Sidoagung merupakan salah satu wilayah yang telah memiliki kelembagaan PKK yang terdiri dari beberapa Kelompok Kerja (POKJA). Kelompok Kerja (POKJA) ini terbagi menjadi empat, yaitu POKJA I, POKJA II, POKJA III, dan POKJA IV. Keberadaan keempat POKJA tersebut menunjukkan bahwa struktur kelembagaan pemberdayaan perempuan telah tersedia secara formal di tingkat kalurahan. POKJA I berfokus pada bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong, POKJA II berfokus pada bidang pendidikan dan keterampilan serta koperasi, POKJA III menangani pangan dan tata laksana rumah tangga, sedangkan POKJA IV bergerak dalam bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil observasi pada buku notulen TP PKK Tahun 2025 di Kalurahan Sidoagung masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program. POKJA I menghadapi kendala kelengkapan administrasi, terutama dalam hal pendataan warga dan pelaksanaan pengajian yang belum berjalan secara optimal. POKJA II masih memiliki catatan administrasi yang belum lengkap, kekurangan buku pojok baca, serta pelaksanaan simpan pinjam yang masih terbatas pada lingkup PKK. Di POKJA III, meskipun administrasi cukup lengkap, inovasi program masih belum optimal termasuk rencana pelaksanaan "Aku Hatinya PKK" yang masih dalam tahap sampel di beberapa dusun.

POKJA IV masih menghadapi berbagai kendala, meliputi pendataan kesehatan dan koordinasi posyandu yang belum optimal, administrasi dan pelaporan kegiatan yang belum tertata, partisipasi anggota yang belum merata, keterbatasan kapasitas SDM, pelaksanaan program yang belum berkelanjutan, serta keterbatasan anggaran yang memengaruhi efektivitas program pemberdayaan perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui PKK di Kalurahan Sidoagung masih belum optimal dari aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, meskipun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program PKK berperan penting dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan perempuan di tingkat desa (Mauludia, 2025).

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Marofah (2023), yang menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui pendekatan pendidikan nonformal berhasil meningkatkan kesadaran gender, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan advokasi perempuan dalam mengakses layanan publik dan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Sementara itu, penelitian Miftakhuljannah et al (2022) tentang peran PKK dalam pemberdayaan perempuan juga mengungkapkan bahwa meskipun kegiatan PKK memberikan peningkatan keterampilan dan kontribusi pada ekonomi keluarga, hasilnya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, rendahnya keberlanjutan program, serta partisipasi masyarakat yang belum merata sehingga dampak pemberdayaan belum optimal di seluruh wilayah. Dalam konteks tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pemberdayaan perempuan melalui PKK sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, dukungan pemerintah desa, serta keterlibatan perempuan dalam berbagai program peningkatan keterampilan dan partisipasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian Haristama & Yonnawati (2025) yang menyebutkan bahwa PKK memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan pemberdayaan pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan masyarakat, sehingga keberhasilan program sangat bergantung pada pelaksanaan organisasi dan partisipasi anggotanya. Meskipun program PKK terbukti mampu meningkatkan kapasitas perempuan pada aspek keterampilan, akses, dan peran sosial, tantangan seperti administrasi yang belum tertata, minimnya inovasi kegiatan, serta koordinasi internal yang belum optimal masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan di tingkat desa. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Hayon & Toulwala (2023) yang menyatakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di

tingkat desa masih menghadapi kendala pada pengelolaan organisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji peran PKK dalam meningkatkan kapasitas perempuan, sebagian besar masih berfokus pada hasil program dan belum menganalisis secara mendalam proses pemberdayaan maupun perbedaan dinamika antar Pokja dalam struktur PKK. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji pemberdayaan perempuan melalui indikator akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta menganalisis secara rinci pelaksanaan dan kendala pada Pokja I–IV di Kalurahan Sidoagung guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pemberdayaan perempuan di tingkat kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sukmadinata (2009:18) dalam Sudaryana (2022) penelitian kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh melalui deskripsi berbentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah, dengan memanfaatkan berbagai metode alami. Penelitian ini dilakukan dari Oktober-Maret 2026 di Kalurahan Sidoagung, Godean, Sleman. Informan ditentukan secara purposive, meliputi perangkat kalurahan, Ketua Pokja I–IV, serta anggota Pokja yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi berupa arsip kegiatan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dalam (Abdussamad, 2021) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan guna menghasilkan temuan penelitian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, organisasi PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga di tingkat kalurahan. Selain berorientasi pada kesejahteraan keluarga, PKK juga berperan sebagai wadah pemberdayaan perempuan melalui berbagai kegiatan sosial dan peningkatan kapasitas. Meskipun bersifat terbuka bagi masyarakat secara umum, pelaksanaan program PKK sebagian besar dijalankan oleh perempuan sehingga menjadi ruang penting dalam penguatan peran perempuan di masyarakat. Dalam penelitian ini, analisis pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Kerja (Pokja) PKK mengacu pada teori pemberdayaan perempuan menurut Riant Nugroho (2008) dalam (Hidayatin, 2021), yang menekankan empat indikator utama, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sebagai ukuran keberhasilan proses pemberdayaan perempuan.

Akses

Indikator akses dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana perempuan yang tergabung dalam POKJA memperoleh kesempatan, kemudahan, serta dukungan struktural untuk terlibat dalam program pemberdayaan. Akses tidak hanya berkaitan dengan keberadaan program, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta dukungan kebijakan dan sumber daya yang memungkinkan perempuan berpartisipasi secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pemberdayaan masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh PKK Kalurahan Sidoagung yang terdiri dari beberapa Kelompok Kerja (POKJA)

Table 1. Permasalahan Akses

Kelompok Kerja (POKJA)	Permasalahan
POKJA I	Tidak mengetahui anggaran kegiatan
POKJA II	Beberapa kegiatan tidak berjalan
POKJA III	Informasi kegiatan belum disampaikan secara jelas
POKJA IV	Peserta Kegiatan dibatasi oleh anggaran yang ada

Sumber: Hasil wawancara dengan anggota POKJA (27 Januari 2026)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan akses tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan program, tetapi juga menyangkut kemampuan anggota dalam memahami serta memanfaatkan program yang ada. Pada Pokja 1, keterbatasan akses terlihat dari rendahnya pemahaman terhadap aspek pengelolaan program, khususnya terkait anggaran. Pernyataan bahwa anggota hanya mengikuti kegiatan yang tersedia menunjukkan bahwa mereka belum memiliki posisi yang cukup kuat dalam mengakses informasi secara menyeluruh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses yang diberikan masih bersifat pasif, di mana perempuan hanya menjadi penerima informasi tanpa memiliki kapasitas untuk memahami atau mengelola program secara mandiri.

Pada Pokja 2, permasalahan akses menunjukkan dimensi yang lebih struktural, yaitu terhentinya kegiatan akibat keterbatasan anggaran. Tidak terselenggaranya pelatihan menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada dukungan sumber daya, sehingga ketika anggaran mengalami pemangkasan, akses perempuan terhadap pemberdayaan juga ikut terhenti. Dengan demikian, akses dalam konteks ini tidak hanya dipengaruhi oleh sistem organisasi, tetapi juga oleh kebijakan pendanaan di tingkat kalurahan. Sementara itu, pada Pokja 3, kendala akses lebih terletak pada kualitas penyampaian informasi. Informasi yang belum disampaikan secara jelas menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pengurus dan anggota. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya pemahaman anggota terhadap tujuan, mekanisme, dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan. Akses informasi yang tidak disertai dengan kejelasan berpotensi menurunkan partisipasi dan efektivitas kegiatan pemberdayaan.

Pada Pokja 4, pembatasan jumlah peserta menjadi faktor utama yang memengaruhi akses. Meskipun kegiatan tersedia, tidak semua anggota dapat terlibat secara langsung karena adanya keterbatasan kuota. Hal ini menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap program pemberdayaan masih bersifat selektif, sehingga belum semua anggota memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa akses perempuan masih berada pada tahap formal dan belum sepenuhnya mencapai akses yang inklusif dan merata. Di sisi lain, pemerintah kalurahan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan melalui integrasi program PKK dalam perencanaan pembangunan desa. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Lurah Kalurahan Sidoagung:

“Program pemberdayaan itu dari kalurahan dan mengakomodir dari TP PKK dengan cara sinkronisasi dengan penganggaran, sehingga kegiatannya dianggarkan di kalurahan” (26 Januari 2026, di Kalurahan Sidoagung).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah kalurahan dan PKK dalam memastikan keberlanjutan program pemberdayaan melalui dukungan anggaran. Integrasi program ke dalam perencanaan desa memperlihatkan bahwa pemberdayaan perempuan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan lokal. Selain dukungan kebijakan, legitimasi kelembagaan PKK juga memperkuat akses perempuan terhadap program pemberdayaan. Hal tersebut dijelaskan oleh Kamituwa sebagai berikut:

“Punya SK, karena kita lembaga. Kalau terkait program kita menyusun sendiri, sedangkan sumber dananya dari APBKal” (27 Januari 2026, di Kalurahan Sidoagung).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PKK memiliki dasar kelembagaan yang sah sehingga memiliki kewenangan dalam menyusun program pemberdayaan. Namun pelaksanaan program tetap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran desa, sehingga ruang gerak kegiatan masih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya yang tersedia. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa akses perempuan terhadap program pemberdayaan di Kalurahan Sidoagung telah tersedia melalui dukungan kelembagaan, sistem komunikasi organisasi, serta kebijakan pemerintah kalurahan. Namun jika dianalisis menggunakan teori pemberdayaan Riant Nugroho, akses tidak hanya berarti tersedianya kesempatan mengikuti kegiatan, tetapi juga

mencakup kualitas informasi, kejelasan pemahaman, serta kesetaraan peluang dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akses perempuan masih berada pada tahap akses formal, karena meskipun saluran informasi telah tersedia, kejelasan informasi belum sepenuhnya optimal dan keterlibatan anggota masih dibatasi oleh faktor anggaran serta mekanisme perwakilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan belum sepenuhnya mencapai akses substantif sebagaimana konsep Nugroho, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk memahami, terlibat, dan mengembangkan kapasitasnya melalui program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sosialisasi program, penyampaian informasi yang lebih rinci dan partisipatif, serta pemerataan keterlibatan anggota agar akses perempuan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong proses pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Partisipasi

Partisipasi dalam pemberdayaan perempuan dimaknai sebagai keikutsertaan perempuan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang tersedia dalam proses pembangunan. Dalam perspektif pemberdayaan Riant Nugroho, partisipasi menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi turut terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan kegiatan, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun penyampaian aspirasi dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PKK Kalurahan Sidoagung yang terdiri dari beberapa Keompok Kerja (POKJA) yaitu sebagai berikut.

Table 2. Permasalahan Partisipasi

Kelompok Kerja (POKJA)	Permasalahan
POKJA I	Keikutsertaan anggota tidak konsisten
POKJA II	Anggota tidak selalu mengikuti kegiatan dan kegiatan yang dilaksanakan tidak rutin dilaksanakan
POKJA III	Partisipasi aktif namun tidak semua anggota terlibat
POKJA IV	Tidak semua anggota dapat mengikuti kegiatan karena adanya pembatasan peserta

Sumber: Hasil wawancara dengan anggota POKJA (@7Januari 2026)

Berdasarkan tabel tersebut, partisipasi perempuan dalam kegiatan PKK menunjukkan tingkat keterlibatan yang berbeda pada masing-masing Pokja. Pada Pokja 3, partisipasi relatif lebih aktif karena anggota terlibat dalam berbagai tahapan kegiatan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa perempuan telah memiliki ruang untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan organisasi. Namun demikian, meskipun terdapat anggota yang aktif, tidak semua anggota memiliki tingkat partisipasi yang sama, sehingga keterlibatan masih bersifat parsial.

Pada Pokja 1, partisipasi yang tidak konsisten menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan masih dipengaruhi oleh faktor internal, seperti motivasi dan ketersediaan waktu. Keikutsertaan yang bersifat situasional menunjukkan bahwa partisipasi belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam aktivitas rutin anggota. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ruang partisipasi telah tersedia, belum semua anggota mampu memanfaatkannya secara optimal. Pada Pokja 2, rendahnya partisipasi sangat dipengaruhi oleh tidak berjalannya kegiatan secara rutin. Ketika program tidak dilaksanakan secara berkelanjutan, maka peluang perempuan untuk terlibat juga menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan program itu sendiri. Tanpa kegiatan yang berjalan, partisipasi tidak dapat terbentuk secara nyata.

Sementara itu, pada Pokja 4, partisipasi dibatasi oleh jumlah peserta yang dapat mengikuti kegiatan. Pembatasan ini menyebabkan tidak semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat, sehingga partisipasi menjadi tidak merata. Meskipun demikian, adanya ruang musyawarah dalam organisasi menunjukkan bahwa perempuan tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, partisipasi perempuan telah terbentuk, tetapi masih belum optimal dan belum merata di seluruh

anggota. Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Kamituwa mengenai peran PKK sebagai lembaga pembinaan masyarakat:

*“PKK itu kan lembaga resmi di kalurahan yang melakukan pembinaan kepada masyarakat”
(Kamituwa, wawancara, 2025).*

Kutipan tersebut menegaskan bahwa PKK berfungsi sebagai wadah partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. Melalui organisasi ini, perempuan memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu maupun kesejahteraan keluarga. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, jika dikaitkan dengan teori pemberdayaan Riant Nugroho, partisipasi perempuan di Kalurahan Sidoagung telah menunjukkan adanya keikutsertaan dalam mendayagunakan sumber daya organisasi melalui kegiatan PKK. Perempuan telah terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta penyampaian aspirasi dalam forum organisasi.

Namun demikian, tingkat partisipasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, frekuensi kegiatan, dan kondisi sosial anggota sehingga keterlibatan belum sepenuhnya merata. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan telah berkembang pada tahap partisipasi fungsional, tetapi belum sepenuhnya mencapai partisipasi optimal sebagaimana konsep Nugroho, di mana seluruh anggota memiliki keterlibatan yang konsisten dan setara dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan mekanisme pelibatan anggota serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan agar partisipasi perempuan dapat berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kontrol

Kontrol dalam pemberdayaan perempuan dimaknai sebagai kesempatan yang sama bagi perempuan untuk melakukan kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya serta menentukan arah pelaksanaan program pembangunan. Dalam perspektif pemberdayaan Riant Nugroho, kontrol menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan, tetapi memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan, prioritas program, serta proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PKK Kalurahan Sidoagung yang terdiri dari beberapa Keompok Kerja (POKJA) yaitu sebagai berikut:

Table 3. Permasalahan Kontrol

Kelompok Kerja (POKJA)	Permasalahan
POKJA I	Tidak mengetahui perihal anggaran
POKJA II	Banyak kegiatan terkendala karena minimnya dana
POKJA III	Terlibat dalam perencanaan tetapi tidak dalam pengelolaan sumberdaya
POKJA IV	Program yang ada disesuaikan dengan anggaran

Sumber: Hasil wawancara dengan anggota POKJA (27 Januari 2026)

Berdasarkan tabel tersebut, kontrol perempuan dalam organisasi PKK menunjukkan adanya keterlibatan dalam aspek perencanaan, namun masih terbatas dalam penguasaan sumber daya. Pada Pokja 1, tidak adanya keterlibatan dalam pengajuan anggaran menunjukkan bahwa perempuan belum memiliki kewenangan dalam menentukan aspek finansial program. Hal ini mengindikasikan bahwa kontrol yang dimiliki masih terbatas pada pelaksanaan kegiatan, sementara keputusan strategis tetap berada pada pemerintah kalurahan. Pada Pokja 2, keterbatasan kontrol terlihat dari banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat minimnya dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki gagasan atau program, realisasinya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Dengan demikian, kontrol terhadap program belum sepenuhnya berada di tangan organisasi perempuan. Pada Pokja 3, perempuan telah terlibat dalam proses perencanaan melalui forum rapat dan penyusunan program kerja. Namun demikian, keterlibatan tersebut belum diikuti dengan kewenangan dalam pengelolaan

sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol perempuan masih bersifat parsial, yaitu hanya pada tahap perencanaan tanpa diikuti dengan kontrol penuh terhadap implementasi program.

Sementara itu, pada Pokja 4, penyesuaian program terhadap anggaran menunjukkan adanya keterbatasan dalam menentukan prioritas kegiatan secara mandiri. Program yang direncanakan harus disesuaikan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia, sehingga ruang kontrol perempuan menjadi terbatas. Secara keseluruhan, kontrol perempuan telah berkembang, namun belum mencapai kemandirian penuh karena masih dipengaruhi oleh faktor struktural, terutama terkait pendanaan. Meskipun demikian, pemerintah kalurahan pada prinsipnya tetap memberikan ruang bagi organisasi PKK untuk menentukan arah program yang akan dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan oleh Lurah Kalurahan Sidoagung sebagai berikut:

“Penentuan kegiatan dari TP PKK sendiri. Kami tidak pernah mengintervensi, mereka punya program apa yang sesuai untuk dilaksanakan di wilayah kalurahan.” (26 Januari 2026, di Kalurahan Sidoagung).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan memberikan ruang otonomi kepada organisasi PKK dalam merancang program pemberdayaan. Tidak adanya intervensi langsung dari pemerintah desa mengindikasikan adanya kepercayaan terhadap kapasitas organisasi perempuan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menentukan kegiatan yang relevan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan melalui wadah PKK telah memperoleh posisi strategis dalam proses perencanaan program pemberdayaan. Ruang kewenangan tersebut memungkinkan perempuan menentukan prioritas kegiatan berdasarkan pengalaman dan kondisi sosial yang mereka hadapi di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran peran perempuan dari sekadar pelaksana program menjadi aktor yang turut menentukan arah kegiatan pemberdayaan di tingkat lokal. Selain itu, Kamituwa menjelaskan bahwa setiap kelompok kerja memiliki program masing-masing yang kemudian dibahas bersama sebelum dilaksanakan:

“Masing-masing pokja itu punya program, kemudian kita bahas dan disesuaikan dengan anggaran.” (27 Januari 2026, di Kalurahan Sidoagung)”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan program dilakukan melalui mekanisme pembahasan bersama. Setiap POKJA memiliki ruang untuk mengusulkan kegiatan sesuai bidang kerja masing-masing, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Proses ini mencerminkan adanya kontrol kolektif dalam organisasi, di mana keputusan program tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui proses diskusi dan pertimbangan bersama. Mekanisme pembahasan tersebut juga menunjukkan adanya proses negosiasi antara kebutuhan program dan kapasitas anggaran desa. Dengan demikian, kontrol perempuan dalam organisasi tidak hanya terlihat pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam proses penyesuaian program agar dapat direalisasikan secara realistis.

Jika dikaitkan dengan teori pemberdayaan Riant Nugroho, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan melalui organisasi PKK telah memiliki kontrol partisipatif dalam menentukan arah pemberdayaan, terutama pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi. Perempuan telah dilibatkan dalam penyusunan program serta proses musyawarah yang menentukan kegiatan pemberdayaan. Namun demikian, kontrol tersebut belum sepenuhnya otonom karena implementasi program masih bergantung pada dukungan sumber daya, khususnya pendanaan dari pemerintah kalurahan. Dalam perspektif Nugroho, kontrol yang ideal terjadi ketika perempuan memiliki kesempatan yang setara tidak hanya dalam menentukan program, tetapi juga dalam mempengaruhi pemanfaatan sumber daya pembangunan. Oleh karena itu, kondisi di Kalurahan Sidoagung menunjukkan bahwa kontrol perempuan telah berkembang menuju kontrol kelembagaan, tetapi belum sepenuhnya mencapai kontrol penuh karena masih adanya ketergantungan struktural terhadap kebijakan anggaran desa.

Manfaat

Indikator manfaat dalam pemberdayaan perempuan berkaitan dengan sejauh mana perempuan memperoleh hasil nyata dari kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan, baik dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, maupun kesejahteraan keluarga. Manfaat menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya terlibat dalam kegiatan, tetapi juga merasakan dampak positif dari pemanfaatan sumber daya dan program pembangunan yang dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan melalui organisasi PKK memberikan manfaat bagi perempuan, namun belum secara maksimal karena masih sedikit terkendala.

Table 4. Permasalahan Manfaat

Kelompok Kerja (POKJA)	Permasalahan
POKJA I	Ilmu belum diterapkan dalam segi ekonpmi
POKJA II	Manfaat tidak dirasakan karena kegiatan tidak berjalan
POKJA III	Manfaat dirasakan tetapi belum maksimal
POKJA IV	Manfaat ada namun terbatas karena kegiatan yang ada juga terbatas

Sumber: Hasil wawancara dengan anggota POKJA (27 Januari 2026)

Berdasarkan tabel tersebut, manfaat pemberdayaan perempuan telah dirasakan, namun tingkatnya berbeda pada masing-masing Pokja. Pada Pokja 3, manfaat terlihat dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan hubungan sosial antaranggota. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan telah memberikan dampak positif terhadap kapasitas individu perempuan. Selain itu, adanya potensi pengembangan keterampilan menjadi kegiatan ekonomi menunjukkan bahwa pemberdayaan memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, pada Pokja 1, manfaat yang diperoleh masih terbatas pada tingkat individu dan belum berkembang ke arah ekonomi produktif. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari kegiatan pemberdayaan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh anggota. Pada Pokja 2, manfaat hampir tidak dirasakan karena kegiatan tidak berjalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan. Tanpa adanya kegiatan yang rutin, perempuan tidak memperoleh manfaat yang signifikan.

Sementara itu, pada Pokja 4, manfaat sudah dirasakan tetapi masih terbatas karena intensitas kegiatan yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat pemberdayaan sangat bergantung pada frekuensi dan kualitas program yang dilaksanakan. Secara keseluruhan, manfaat pemberdayaan perempuan telah muncul, namun belum merata dan masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek keberlanjutan dan pengembangan ekonomi. Berdasarkan temuan tersebut, indikator manfaat menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK telah memberikan dampak positif berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, jejaring sosial, serta peluang ekonomi bagi perempuan. Meskipun demikian, manfaat yang dihasilkan masih memerlukan penguatan pada aspek keberlanjutan program dan dukungan sumber daya agar hasil pemberdayaan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan oleh seluruh anggota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK di Kalurahan Sidoagung berdasarkan indikator akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat menunjukkan bahwa program telah berjalan dan memberikan dampak positif, namun belum sepenuhnya optimal. Secara implikatif, perempuan telah memiliki akses dan ruang partisipasi dalam kegiatan organisasi serta terlibat dalam perencanaan program, tetapi masih terdapat kesenjangan pada pemerataan akses, konsistensi partisipasi, serta keterbatasan kontrol terutama dalam aspek anggaran. Manfaat pemberdayaan telah dirasakan dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan relasi sosial, namun belum sepenuhnya berkembang ke arah kemandirian ekonomi.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan kualitas sosialisasi program, keberlanjutan kegiatan pemberdayaan, serta pemerataan keterlibatan anggota. Selain itu,

penguatan kapasitas organisasi dan dukungan anggaran dari pemerintah kalurahan perlu dioptimalkan agar perempuan tidak hanya terlibat dalam perencanaan, tetapi juga memiliki peran yang lebih kuat dalam pengelolaan program, sehingga pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak dan informan penelitian yang terlibat dalam penelitian peneliti. Penulis juga mengucapkan terima kasih juga kepada keluarga dan teman yang telah memberikan dukungan penuh kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); D). CV.Syakir Media Press.
- Dupuis, S., Hennink, M., Wendt, A. S., Waid, J. L., Kalam, A., Gabrysch, S., & Sinharoy, S. S. (2022). Women ' s empowerment through homestead food production in rural Bangladesh. *BMC Public Health*, 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12524-2>
- Haristama, & Yonnawati. (2025). Pemberdayaan Perempuan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Argomulyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Tanggamus Tahun 202. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1368>
- Hermawan, E., Pebriani, D., Julianty, D. N., Safitri, F., & Laksono, G. T. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 191–198.
- Hidayatin, N. (2021). Efektifitas Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Up2K-Pkk Di Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(1), 166–184. <https://doi.org/10.38156/jisp.v1i1.10>
- Hutagalung, S. S. (2022). *buku pemberdayaan* (1st ed.). http://repository.lppm.unila.ac.id/42156/1/Buku_ajar_partisipasi_dan_pemberdayaan_di_sektor_publik%281%29.pdf
- Jaiswal, J. K., Kumar, B., & Kumari, P. (2024). *Women Empowerment through Self-help groups : A Systematic Review and Research Agenda b s t r a c t*. 18(2), 99–115.
- Kusumaningsih, S., & Rianawati, T. (2024). *Peran Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terhadap Program Pemberdayaan Perempuan*. 4(1), 264–269. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/dinamika.v4i1.544>
- Marofah, S. (2023). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sekolah Perempuan di Desa Kabupaten Gresik. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 11, 475–488.
- Mauludia, M. (2025). *Women Empowerment Through PKK-Based Family Welfare Programs : Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Kesejahteraan Keluarga Berbasis PKK*. 16(2), 1–16. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v16i2.1250>
- Miftakhuljannah, Isabella, & Amaliatulwalidain. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Pemberdayaan KEsejahteraan Keluarga (PKK). *Jurnal KAJIAN Pemerintah, Politik, Dan Birokrasi*, VIII(2), 6–14. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/wedana.2022.vol8\(2\).10271](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/wedana.2022.vol8(2).10271)
- Muktiono, A. (2024). Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan PKK di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(1), 53–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3094>
- Setiawan, C., & Kusniawati, A. (2024). Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Upaya Pengembangan Desa Wisata Universitas Galuh , Indonesia Menurut Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sifatnya sementara dilakukan secara sukarela tanpa paksaan untuk menikmati objek w. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 1, 23–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/ebisman.v2i3.688>
- Sudaryana, B. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (I). https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif/M7NNEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+kualitatif+sudaryana&pg=PA288&printsec

=frontcover

- Suharto. (2021). *Kelembagaan Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Undang-Undang Desa*. 9(1), 167–186.
- Suryati, & Nazarmanto. (2022). Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non Formal. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(2), 70–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/al-basyar.v1i2.18613>
- Utami, A., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2025). Implementasi Program PKK dalam Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan Perempuan di Desa Naga Timbul Implementation of the PKK Program in Improving Women ' s Education and Skills in Naga Timbul Village. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v7i1.4451>
- Ver, E., Farroñ, R., Agust, M., & Segundo, F. (2024). *Sustainability and Rural Empowerment : Developing Women ' s Entrepreneurial Skills Through Innovation*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su162310226>